

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini akan membahas pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka, dan jumlah unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Boediono dalam penelitian(Rugian 2013), “pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan Output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu proses, Output perkapita dan jangka panjang. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian. Jadi, “pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat”

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas suatu negara dalam jangka panjang untuk menyediakan berbagai barang dan jasa bagi penduduknya menurut Tandaro dalam penelitian(Asnawi, Engka, and Walewangko 2022). Menurut Sadono Sukirno dalam(Dogiyayi 2023), pertumbuhan ekonomi merujuk pada kemajuan dalam kegiatan ekonomi yang meningkatkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Isu pertumbuhan ekonomi bisa dilihat sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Peningkatan kemampuan untuk

memproduksi barang dan jasa sebagai hasil dari penambahan faktor produksi tidak selalu diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang sebanding. Seringkali, pertumbuhan potensi produksi melebihi peningkatan produksi yang aktual. Dengan begitu, perkembangan ekonomi cenderung lebih lambat dibandingkan dengan potensinya.

Menurut Suryana 2000 dalam penelitian (Bawuno, Kalangi, and Sumual 2015) mengemukakan pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dari definisi ini mengandung tiga unsur yaitu :

1. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus-menerus yang didalamnya telah mengandung unsur unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru.
2. Usaha meningkatkan pendapatan perkapita.
3. Kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang.

Teori pertumbuhan Harrod-Domar muncul dari hasil pemikiran dua ekonom setelah Keynes, yaitu Roy F. Harrod dan Evsey D. Domar. Harrod pertama kali mempresentasikan teorinya pada tahun 1939 di *Economic Journal* dengan judul "*An Essay on Dynamic Theory*," sementara Domar menerbitkan teorinya pada tahun 1947 di *American Economic Review* dengan judul "*Expansion and Employment*." Secara mendasar, teori ini merupakan pengembangan dari teori makro yang diusulkan oleh Keynes. Analisis yang dilakukan oleh Keynes dianggap kurang memadai karena tidak menguraikan isu-isu ekonomi yang terjadi dalam jangka

panjang. Di sisi lain, teori Harrod-Domar berupaya menganalisis persyaratan yang diperlukan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan suatu perekonomian dalam waktu yang panjang. Dengan demikian, teori ini berfokus pada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara stabil dalam penelitian (Yunianto 2021).

Ada sejumlah instrumen yang digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi, yaitu; Produk Domestik Bruto (PDB) yang menilai total pendapatan dalam perekonomian dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berfungsi untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah (Syarif and Riau 2021). Ada sejumlah rumus yang menghitung pertumbuhan ekonomi:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRBt}}{\text{PDRBt-1}} \times 100\%$$

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai tambah atau pendapatan dari semua aktivitas ekonomi di suatu area dalam periode tertentu. PDRB dapat dihitung dengan dua metode, yaitu PDRB menggunakan harga berlaku (pendapatan nominal) dan PDRB menggunakan harga konstan (pendapatan riil). Untuk menghitung PDRB berdasarkan harga berlaku, digunakan harga barang dan jasa pada tahun tersebut, sementara untuk PDRB berdasarkan harga konstan, digunakan harga dari tahun tertentu yang disebut tahun dasar (Syarif and Riau 2021)

Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

Menurut Robert Solow dalam (Bapedda 2017) ekonomi yang memenangkan hadiah nobel pada tahun 1987. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi

akan tercapai jika ada pertumbuhan output. Pertumbuhan output terjadi jika dua faktor input, yakni modal dan tenaga kerja dikombinasikan, sedangkan faktor teknologi dianggap konstan (tidak berubah). Adapun yang tergolong sebagai modal adalah bahan baku, mesin, peralatan, komputer, bangunan dan uang. Dalam memproduksi output, faktor modal dan tenaga kerja bias dikombinasikan dalam berbagai model kombinasi. Sehingga, bisa dituliskan dalam rumus sebagai berikut:

$$Q = f(C, L)$$

Keterangan:

Q = Jumlah output yang dihasilkan

f = Fungsi

C = Capital (modal sebagai input)

L = Labour (tenaga kerja, sebagai input)

Rumus di atas menyatakan bahwa output (Q) merupakan fungsi dari modal (C) dan tenaga kerja (L). Ini berarti tinggi rendahnya output tergantung pada cara mengombinasikan modal dan tenaga kerja.

Menurut Harrod dan Domar dalam (Bapedda 2017) mengemukakan perlunya pembentukan modal sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap (*steady growth*). Menurut mereka, bila pembentukan modal telah dilakukan pada suatu masa, maka pada masa berikutnya perekonomian akan sanggup memproduksi barang-barang dalam jumlah lebih besar. Keinginan masyarakat dalam pembentukan modal (berinvestasi) ditentukan oleh permintaan agregat (keseluruhan) dari masyarakat dan oleh MEC (*Marginal Efficiency of*

Capital), yakni perbandingan antara pertambahan modal terhadap pertambahan output.

Menurut Joseph Schumpeter dalam (Bapedda 2017) pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada inovasi dari para pengusaha (wiraswasta). Dalam hal ini, inovasi merupakan penerapan pengetahuan dan teknologi yang baru di dunia usaha. Inovasi memiliki pengaruh sebagai berikut:

1. Diperkenalkannya teknologi baru
2. Menimbulkan keuntungan yang lebih tinggi.
3. Menimbulkan imitasi inovasi, yaitu peniruan teknologi baru oleh pengusaha-pengusaha lain yang dapat meningkatkan hasil produksi

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut (Putra & Hidayah, 2023) Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai tolak ukur untuk mengklasifikasikan apakah negara tersebut maju, berkembang atau terbelakang dan juga untuk mengukur dari kebiaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Selain itu indeks pembangunan manusia juga menjadi parameter untuk melihat pengaruh kebijakan ekonomi suatu negara terhadap kualitas rakyatnya. Tidak hanya digunakan sebagai tolak ukur pengelompokan suatu Negara tetapi juga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur dan pengelompokan Subnegara (daerah/bagian).

Menurut (Novdwikaputri, 2022) dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa belanja modal mampumempengaruhi *Human* Indeks Pembangunan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap IPM kabupaten/kota di Sumatera Utara, dan belanja modal dan

pertumbuhan ekonomi. Belanja modal sektor pendidikan dan sektor kesehatan akan membantu sekali dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Sarana prasarana pendidikan lengkap siswa juga akan nyaman dan sarana prasarana alat kesehatan lengkap tingkat kesehatan lama hidup akan meningkat.

Penelitian oleh (Fitria et al., 2021) menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013-2020. Dengan menggunakan metode regresi data panel dan model *Fixed Effect*, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi utama (Haryono, Murti, and Yolanda 2023):

1. **Kesehatan:** Dihitung berdasarkan angka harapan hidup.
2. **Pendidikan:** Diukur dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
3. **Standar Hidup Layak:** Dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

IPM sangat berguna sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia di suatu daerah dan dapat menentukan keberhasilan pembangunan secara makro.

Indeks Pembangunan Manusia ditentukan sebagai rata-rata geometris dari indeks pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran, dengan rumus seperti berikut.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

di mana : :

$I_{Kesehatan}$: Indeks kesehatan

$I_{Pendidikan}$: Indeks pendidikan

$I_{Pengeluaran}$: Indeks pengeluaran

Pencapaian dalam pembangunan manusia di suatu daerah pada waktu tertentu dapat dibagi menjadi empat kategori. Pembagian ini bertujuan untuk mengelompokkan daerah-daerah menjadi kategori yang serupa terkait pembangunan manusia. (Karonika Sihite 2024).

1. Kelompok “ Sangat Tinggi “ : IPM 80
2. Kelompok “ Tinggi “ : 70 IPM < 80
3. Kelompok “ Sedang “ : 60 IPM < 70
4. Kelompok “ Rendah “ : IPM < 60

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya menurut Sukirno, 2010 dalam penelitian (Septiawati et al., 2022). Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.

Dalam menangani pengangguran yang selalu diperhatikan bukanlah mengenai jumlah pengangguran, tetapi mengenai tingkat pengangguran yang dinyatakan sebagai presentase dari angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah presentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, yang sudah , mempunyai pekerjaan tetapi belum belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada (Septiawati et al., 2022)

2.1.3.1 Teori Pengangguran

Teori pengangguran menurut DR. Suparmono, M.Si dalam buku ekonomi makro

Pengangguran adalah isu yang hampir selalu ada di berbagai perekonomian, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Secara umum, pengangguran diartikan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Dengan kata lain, pengangguran merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak memiliki kesempatan kerja. Status pengangguran tidak selalu sama dengan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang dalam pencarian pekerjaan. Mereka yang sudah bekerja dan menjalani tugasnya pun bisa dianggap sebagai pengangguran karena pengertian pengangguran dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

- a. Waktu
- b. Intensitas pekerjaan
- c. Produktivitas

Orang yang sudah bekerja dapat digolongkan sebagai setengah pengangguran apabila pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimilikinya sehingga hasil akhir dari pekerjaannya di bawah produktivitas yang seharusnya. Secara lebih rinci, setengah pengangguran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Setengah penganggur kentara (*visible under-employment*) yang mencerminkan kondisi orang yang bekerja tetapi mengalami ketidakcukupan dalam volume pekerjaan yang dilakukan
- b. Setengah penganggur tak kentara (*invisible under-employment*) dapat tercermin dari adanya ketidaktepatan dalam penempatan sumber daya manusia, atau adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan faktor produksi. Hal ini ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan, keterampilan yang kurang dimanfaatkan, dan rendahnya tingkat produktivitas.

Selain itu, Edgar O. Edwards menggolongkan pengangguran menjadi 5 bentuk, yaitu:

- 1) Pengangguran terbuka (open unemployment) Pengangguran terbuka dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pengangguran sukarela

Pengangguran sukarela merupakan kelompok angkatan kerja yang memilih tidak bekerja karena tidak bersedia digaji pada jumlah tertentu maupun mengharapkan pekerjaan yang lebih baik

b. Penganggur terpaksa

Pengangguran terpaksa merupakan kelompok angkatan kerja yang bersedia bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan

1. Setengah penganggur (underemployment)

Tenaga kerja yang termasuk setengah menganggur adalah kelompok tenaga kerja yang lamanya bekerja (dalam satuan hari, jam, ataupun minggu) kurang dari yang seharusnya mereka bisa kerjakan. Misalnya orang yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi orang tersebut malas-malasan, datang terlambat, maupun mendahului pulang

2. Bekerja secara tidak penuh

a. Pengangguran tak kentara (*disguised unemployment*) Contoh pengangguran tak kentara adalah petani yang bekerja di sawah selama sehari penuh dari pagi sampai sore. Bila dilihat dari jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan di sawah, pekerjaan tersebut tidaklah perlu dilakukan sehari penuh, melainkan cukup setengah hari saja.

b. Pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*) Penyebab pengangguran tersembunyi adalah orang yang bekerja tidak sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikannya sehingga orang tersebut tidak dapat bekerja secara maksimal.

c. Pensiun awal Pensiun awal memiliki tujuan tertentu, misalnya untuk memberi kesempatan tenaga kerja baru yang memiliki pemikiran yang lebih aplikatif maupun mengurangi tenaga kerja tua yang produktivitasnya mulai menurun.

3. Tenaga kerja lemah (*impaired*)

Kelompok ini sebenarnya memiliki pekerjaan dan bekerja secara penuh, tetapi intensitasnya rendah. Jenis pengangguran ini dikarenakan kurang gizi maupun menderita penyakit tertentu.

4. Tenaga kerja tidak produktif

Kelompok angkatan kerja ini sebenarnya sudah memiliki pekerjaan dan mampu bekerja secara produktif, tapi karena kurangnya fasilitas yang dimiliki perusahaan mengakibatkan mereka menghasilkan pekerjaan yang tidak memuaskan. Misalnya mesin yang dimiliki sudah usang, kondisi pabrik yang tidak nyaman, maupun bahan baku yang tidak tersedia secara rutin.

Pengangguran terbuka adalah individu dalam rentang usia kerja yang tidak sedang bekerja, aktif mencari pekerjaan, atau menyiapkan usaha. Mereka juga termasuk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sulit untuk mendapatkannya, serta yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum memulai. Rasio Pengangguran Terbuka dapat dihitung dengan membandingkan total pengangguran dengan jumlah angkatan kerja (Satria Utama, Suparti, and Rahmawati 2015).

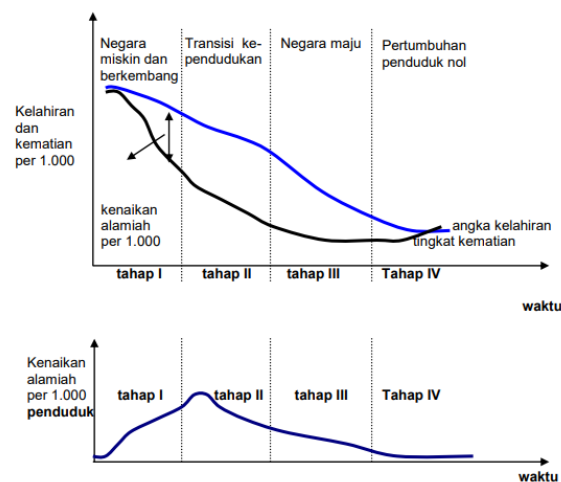
$$TPT = \frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

2.1.3.2 Penyebab Pengangguran

a. Pertumbuhan Penduduk tinggi

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi masalah pembangunan yang serius apabila penduduk tersebut tidak memiliki keahlian dan perekonomian tidak

mampu menyerapnya di pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan kemampuan perekonomian menyediakan lapangan pekerjaan akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Pertumbuhan penduduk di negara berkembang yang lebih tinggi daripada negara maju merupakan salah satu pemicu terjadinya pengangguran, selain kemampuan negara maju yang mampu menyediakan kesempatan kerja bagi penduduknya. Dilihat dari pola perkembangannya di masa datang, pertumbuhan penduduk di negara berkembang akan mengalami penurunan seperti yang terlihat melalui tahapan-tahapan pada Gambar dibawah. Pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan penduduk yang tinggi diiringi dengan tingkat kematian yang tinggi pula sehingga pertumbuhan penduduk lamban. Setelah itu pada tahap II terjadi peningkatan taraf hidup dan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat sehingga mengakibatkan angka kematian mengalami penurunan dan pertumbuhan penduduk mulai meningkat serta usia harapan hidup (life expectancy) semakin lama. Kondisi ini apabila tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai bagi mereka akan mengakibatkan pengangguran yang bersifat alamiah. Negara maju, pada tahap III tingkat kelahiran mengalami penurunan dan di sisi lain tingkat kematian juga mengalami penurunan. Penurunan tingkat kelahiran lebih besar daripada penurunan tingkat kematian sehingga pertumbuhan penduduk sangat lambat. Lambatnya pertumbuhan penduduk di negara maju didukung oleh kemampuan negara dalam menciptakan kesempatan kerja menyebabkan permasalahan pengangguran tidak separah seperti yang dialami oleh negara maju.



Sumber : Buku ekonomi makro DR. Suparmono, M.Si

Gambar 2.1 . Pola Perkembangan Kependudukan

b. Rendahnya laju investasi produktif

Rendahnya investasi di negara berkembang merupakan salah satu penyebab rendahnya kesempatan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Meskipun sumber daya alam yang dimiliki melimpah, tetapi kapasitas produksi dan sumber daya yang ada belum digunakan secara penuh (*underemployment*) sehingga terjadi *idle capacity*,

c. Rendahnya kualitas Pendidikan Masyarakat

Pengangguran dapat terjadi karena masyarakat tidak mampu memanfaatkan kesempatan kerja yang tersedia. Ketidakmampuan dalam memanfaatkan kesempatan kerja tersebut, salah satunya disebabkan oleh ketidaksesuaian keahlian yang dibutuhkan dengan keahlian tenaga kerja yang dimiliki. Di sebagian negara berkembang, rendahnya keahlian angkatan kerja dikarenakan rendahnya kualitas pendidikan yang diperoleh masyarakat. Dengan demikian, kesempatan kerja yang tersedia itu akan dimanfaatkan oleh tenaga kerja yang berasal dari luar daerah

tersebut, atau bahkan dari luar negeri. Pengangguran yang terjadi disebabkan karena rendahnya kualitas pendidikan dari angkatan kerja yang bersangkutan, maka cara untuk mengatasinya adalah dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal.

2.1.4 UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. UMKM dikenal sebagai salah satu pilar utama dalam meningkatkan perekonomian nasional dan daerah karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menggerakkan ekonomi local (Firdausya & Ompusunggu, 2023) Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, saat ini terdapat sekitar 65,4 juta UMKM di Indonesia yang mempekerjakan sekitar 56% tenaga kerja dan memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB negara

Menurut (Azzahra et al., 2022) jumlah unit usaha Industri Mikro dan Kecil (IMK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2010-2020. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dan menunjukkan bahwa variabel jumlah unit usaha IMK berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak unit usaha yang beroperasi, semakin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Di Indonesia, definisi UMKM diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 mengenai UMKM (UU No. 20/tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 2008). Dalam Pasal 1 undang-undang ini, disebutkan bahwa usaha mikro adalah kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh individu atau entitas perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang mandiri, dikelola oleh individu atau organisasi yang bukan merupakan cabang dari perusahaan besar atau menengah serta tidak dimiliki atau dikuasai baik secara langsung maupun tidak oleh entitas yang lebih besar, yang memenuhi syarat usaha kecil berdasarkan definisi dalam undang-undang tersebut menurut Tambunan dalam penelitian (Tasyim, Kawung, and ... 2021)

Menurut Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam (Bustam 2016), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro, adalah entitas bisnis dengan total kekayaan bersih maksimal Rp 50. 000. 000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, usaha ini memiliki total penjualan tahunan antara Rp 300. 000. 000,- hingga Rp 2. 500. 000. 000,-. Di sisi lain, Usaha Menengah (UM) adalah entitas usaha yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dengan kekayaan bersih dari lebih Rp 500. 000. 000,- hingga Rp 10. 000. 000. 000,- tanpa memperhitungkan tanah dan bangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, definisi UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
2. Usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi yang mandiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak termasuk sebagai anak perusahaan atau cabang dari perusahaan lain, baik yang dimiliki, dikuasai, atau terhubung secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil, atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.

Kriteria UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Tabel 2. 1 Kriteria UMKM Berdasar Aset dan Omzet

No	URAIAN	ASET	OMZET
1	Usaha Mikro	Maksimum Rp 50 juta	Maksimum Rp 300 juta
2	Usaha Kecil	> Rp 50 juta – 500 juta	> Rp 300 juta – 2,5 miliar
3	Usaha Menengah	> Rp 500 juta - < 1 miliar	> Rp 2,5 miliar – 50 miliar

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Sementara itu, menurut BPS tahun 2023 merumuskan kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 2 Kriteria UMKM Berdasar Jumlah Tenaga Kerja

No	Kelompok UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
1	Usaha Mikro	Kurang dari 4 orang
2	Usaha Kecil	5 – 19 orang
3	Usaha Menengah	20 – 99 orang

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

1.1.5 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mengenai “Pengaruh Indeks Pembangunan manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah unit Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat 2019-2023”. Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan penelitian ini.

Tabel 2. 3 Penelitian terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Refrensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Lidyawati Padang ,Murtala (2019) “Pengaruh Jumlah penduduk miskin dan Tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia”	Variable independen: TPT Variable dependen: Pertumbuhan Pekonomi	Variable independen : Jumlah penduduk miskin	Variabel JPM secara parsial berpengaruh negatif signifikan sedangkan variable TPT berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia	https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i1.3167
2	Dwi Yuniarto (2021) “Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan Ekonomi”	Variable dependen: Pertumbuhan ekonomi	Variable independen: Pertumbuhan penduduk dan	Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif signifikan sedangkan kepadatan penduduk	https://pdfs.semanticscholar.org/398c/7726dfb2393cc29c
3	Citra Amelia, & Edward (2022) “Analisis Indeks pembangunan manusia dan Pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat pada masa pandemi	Variable independen: IPM Variable dependen: Pertumbuhan ekonomi	Variable independen: adanya penambahan Jumlah unit UMKM	IPM berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat	https://jurnal.widyagama.ac.id/index.php/cebi/article/view/44
4	Susiani Dewi Kusuma , Meidy Haviz “Jumlah UMKM dan Ekspor UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Variable independen: Jumlah UMKM Variable dependen: Pertumbuhan ekonomi	Variable independen: Ekspor UMKM	Jumlah UMKM dan Ekspor UMKM berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	https://doi.org/10.29313/bcese.v5i1.17365
5	Izulhak Gimnastiar (2024) Pengaruh Tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan manusia terhadap Pertumbuhan ekonomi Lima kota/kabupaten di Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan kota Bandung	Variable dependen: Pertumbuhan ekonomi Variable independen: IPM,TPT	Vavariable independent: adanya penambahan Jumlah uni UMKM	Tingkat Kemiskinan berpengaruh positif signifikan, dan IPM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.	https://dspace.uui.ac.id/
6	Arya Darmawan (2020) Pengaruh Kemiskinan, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Pertumbuhan ekonomi	Variable dependen: Pertumbuhan ekonomi	Variable independen: Kemiskinan,Pendidikan, Kesehatan	Kemiskinan, Pendidikan, dan Kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi	https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52165/1/ARYA%20DARMAWAN

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Refrensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Jawa Timur secara parsial dan simultan	
7	Vista Puji Winarti, Fyesya Erliantari, Deris Desmawan “Pengaruh Indeks Pembangunan manusia terhadap Pertumbuhan ekonomi di provinsi Banten	Variable independen: Indeks pembangunan manusia Jumlah unit UMKM	Variable independen: adanya variable TPT, Jumlah unit UMKM	Indeks Pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan ekonomi di provinsi Banten	10.36985/ekui lnomi.v4i2.45 4
8	Sugeng Haryono, Wahyu Murti, Yolanda (2023) “Faktor faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan manusia dan dampaknya pada Pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa”	Variable independen: Indeks pembangunan manusia Variable dependen: Pertumbuhan ekonomi	Variable independen : adanya variable TPT, Jumlah Unit UMKM	Pengangguran dan kejahatan berpengaruh negatif terhadap IPM Akibatnya, IPM menurun, pengangguran dan kemiskinan meningkat, daya beli melemah, dan perekonomian terganggu.	10.30998/jabe. v9i3.16467
8	Ferdy Ferdian, Alpon Satrianto (2022) “Pengaruh infrastuktur ekonomi, sosial dan foreign direct investment terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia”	Variable dependen: Pertumbuhan ekonomi	Variable independen: infrastuktur ekonomi, sosial dan foreign direct investment	Infrastruktur ekonomi dan FDI berpengaruh positif dan signifikan Sementara itu, infrastruktur sosial berpengaruh positif signifikan Investasi	https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jpek/article/viewFile/41486/37741
9	Eunike, Josep, Jacline I. Sumual (2015) “Pengaruh investasi pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Manado”	Variable dependen: Pertumbuhan ekonomi	Variable independen: investasi pemerintah dan tenaga kerja	Pemerintah berpengaruh positif signifikan dan Tenaga Kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/9498
10	Sarah Azzahra (2022) “Analisis pengaruh jumlah unit usaha industri mikro dan kecil (IMK), tenaga kerja IMK dan pendapatan IMK terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia pada	Variable dependen Pertumbuhan ekonomi	Variable independen: jumlah unit usaha industri mikro dan kecil (imk), tenaga kerja imk dan	jumlah unit usaha Industri Mikro Kecilberpengaruh positif lalu tenaga kerja IMK pendapatan IMK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan	https://doi.org/10.31004/irje.v3i1.234

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Refrensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	tahun 2010-2020”		pendapatan imk	ekonomi	
11	Fira Talitha Salsabila (2022) “Pengaruh jumlah unit umkm dan jumlah Tenaga kerja umkm terhadap Pertumbuhan ekonomi di Indonesia”	Variable independen: Jumlah unit UMKM Variable dependen: Pertumbuhan ekonomi	Variable independen: Tenaga kerja UMKM	jumlah unit UMKM secara parsial tidak berpengaruh signifikan lalu jumlah unit UMKM dan jumlah tenaga kerja UMKM berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.	http://jurnallppm.uinsby.ac.id/index.php/IJE R
12	Alvy (2021) “Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur	Variable independen: TPT, IPM Variable dependen: Pertumbuhan ekonomi	Variable independen: Tingkat kemiskinan	kemiskinan, IPM menunjukkan pengaruh signifikan dan TPT negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	https://repository.um.ac.id/262382/
13	Irena Ade Putri, yoyok (2016) “Pengaruh Tingkat pendidikan dan Tingkat pengangguran terhadap Pertumbuhan ekonomi kota surabaya”	Variable dependen: Pertumbuhan ekonomi	Variable independen: Tingkat Pendidikan dan Tingkat pengangguran	Tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2003 2012.	https://doi.org/10.26740/jupe.v4n3.p%25p
14	Moh. Arif Novriansyah (2018) “Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo”	Variable dependen: Pertumbuhan ekonomi	Variable independen: Pengangguran dan Kemiskinan	Pengangguran dan kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo.	https://doi.org/10.32662/golder.v1i1.115
15	Farathika (2020) “Pengaruh Indeks Pembangunan manusia, kemiskinan, pengangguran terhadap Pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh”	Variable independen: IPM Variable dependen: Pertumbuhan ekonomi	Variable independen: Kemiskinan pengangguran	secara parsial Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan ,Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi	https://doi.org/10.33059/jse.v4i2.2303

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang mengungkapkan dan menentukan persepsi serta hubungan antara variabel yang akan diteliti dengan teori yang telah dipaparkan pada tinjauan pustaka. Mengacu terhadap teori yang ada, secara garis besar penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah unit UMKM terhadap Pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat 2019 – 2023.

2.2.1 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan ekonomi

Pada penelitian (Haryono et al. 2023) variabel yang menjadi fokus adalah pertumbuhan ekonomi (PE), sementara variabel lainnya terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka pengangguran, dan indeks kriminalitas. Keterkaitan antara variabel-variabel tersebut menunjukkan bahwa peningkatan IPM dapat membawa kepada peningkatan produktivitas serta daya saing masyarakat. Di sisi lain, tingkat pengangguran yang tinggi dan meningkatnya angka kejahatan dapat merendahkan IPM, karena pengangguran mengakibatkan berkurangnya pendapatan per kapita serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan dari studi yang dilakukan oleh (Amelia, Edward, and Silalahi 2020) fokus utama terdapat pada pertumbuhan ekonomi (PE), sedangkan variabel lainnya meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dinilai melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Hubungan antara variabel-variabel ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM dapat secara signifikan mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil estimasi

regresi yang menghasilkan nilai yang signifikan, yang menunjukkan bahwa IPM memiliki dampak yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat selama pandemi. Dengan kata lain, perbaikan dalam kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat yang tercermin dalam IPM sangat berperan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, rendahnya IPM bisa menghambat pembangunan ekonomi karena kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat belum mencapai optimal.

2.2.2 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Pertumbuhan ekonomi

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu ukuran yang sangat penting dalam kajian ekonomi yang menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, studi ini bertujuan untuk menyelidiki relasi antara TPT dan pertumbuhan ekonomi, dengan perhatian khusus pada bagaimana perubahan dalam tingkat pengangguran bisa memengaruhi laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). TPT yang tinggi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah tenaga kerja yang ada dan pekerjaan yang tersedia, yang dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian (Fitria, Suhaedi, and Permanasari 2021) TPT mengalami kenaikan, kemungkinan produktivitas tenaga kerja yang tidak terpakai juga bertambah, yang berdampak negatif pada output ekonomi. Di sisi lain, jika TPT menurun, diharapkan partisipasi tenaga kerja dalam aktivitas ekonomi akan meningkat, yang lantas dapat mendorong pertumbuhan PDRB. Penelitian ini

menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) untuk menganalisis informasi dari 27 Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2013 hingga 2020. Temuan analisis menunjukkan bahwa TPT berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menandakan bahwa kenaikan TPT berkontribusi pada penurunan pertumbuhan ekonomi.

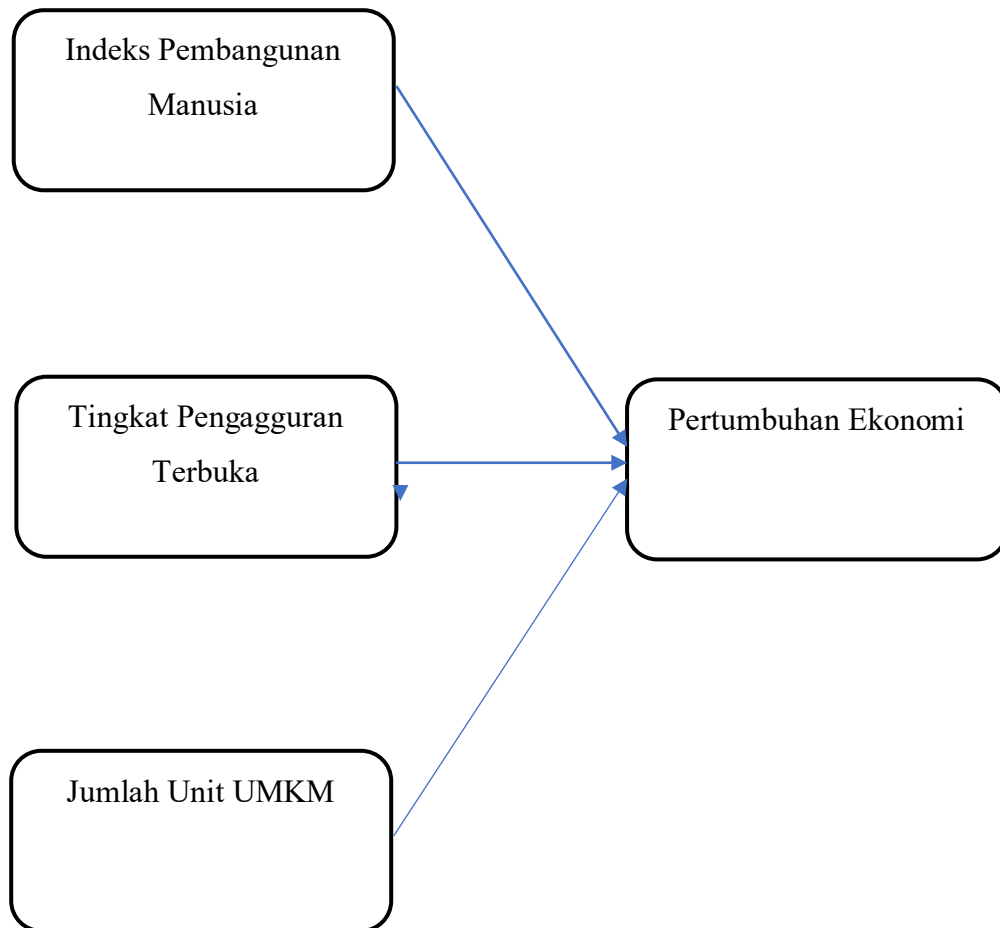
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Padang and Murtala 2020) mengindikasikan bahwa tingkat pengangguran terbuka berdampak negatif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini berarti, apabila jumlah pengangguran meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun. Temuan ini menunjukkan bahwa mengurangi tingkat pengangguran terbuka melalui penciptaan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.2.3 Hubungan Jumlah unit UMKM dengan Pertumbuhan ekonomi

Jumlah unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang besar dalam perkembangan ekonomi. Semakin banyak unit UMKM yang beroperasi, semakin besar kontribusi sektor ini dalam menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi secara umum. Ini menunjukkan adanya hubungan positif antara pertumbuhan jumlah unit UMKM dan perkembangan ekonomi. Penambahan jumlah UMKM dapat memperluas basis produksi serta konsumsi lokal, serta menciptakan jaringan pasokan yang kokoh. Temuan ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh (Tasyim et al. 2021), yang mengungkapkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan

antara jumlah unit UMKM dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya, peningkatan jumlah UMKM berhubungan dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, perlu diingat bahwa kualitas serta produktivitas UMKM juga menjadi elemen penting dalam menentukan seberapa besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain jumlah, keberlanjutan dan inovasi di dalam UMKM turut memengaruhi daya saing ekonomi, baik lokal maupun nasional. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung peningkatan jumlah dan kapasitas UMKM secara berkelanjutan akan memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Bustam 2016) mengungkapkan bahwa jumlah unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak UMKM yang beroperasi, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi yang dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa UMKM adalah tiang penyangga perekonomian daerah karena memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat fondasi ekonomi lokal. Dalam hal ini, UMKM tidak hanya berfungsi sebagai pendorong sektor informal, tetapi juga sebagai alat penting dalam distribusi kesejahteraan dan penciptaan nilai tambah. Oleh karena itu, peningkatan jumlah UMKM yang aktif dan beroperasi berkontribusi langsung terhadap meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menjadi ukuran utama pertumbuhan ekonomi daerah.



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai elemen, antara lain mutu sumber daya manusia yang dinyatakan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), serta banyaknya unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peningkatan IPM diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing, sedangkan tingginya TPT berpotensi menghalangi perkembangan ekonomi, dan UMKM berfungsi sebagai pendorong

utama aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Dengan demikian, ketiga faktor ini diperkirakan memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 hingga 2023.

- a. Diduga secara Parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan jumlah unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpengaruh positif sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 – 2023
- b. Diduga secara bersama Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 – 2023